



Judul : BPK: Mayoritas Pemda Belum Mandiri Fiskal
Tanggal : Rabu, 15 Juli 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 10

BPK: Mayoritas Pemda Belum Mandiri Fiskal

■ ADINDA PRYANKA

JAKARTA – Sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri secara fiskal. Hal ini merupakan hasil kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah 2018 dan 2019 yang dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (14/7).

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, *review* kemandirian fiskal daerah dilakukan mencakup seluruh pemerintah daerah dengan empat level penilaian, yakni belum mandiri, menuju kemandirian, mandiri, hingga sangat mandiri.

Dari 542 pemerintah daerah, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level sangat mandiri, yakni Kabupaten Badung di Provinsi Bali dengan indeks kemandirian fiskal (IKF) mencapai 0,8347. "Berarti, 83,47 persen belanja daerah didanai oleh pendapatan yang dihasilkan sendiri atau melalui pendapatan asli daerah," ujar Agung.

Indeks Kabupaten Badung lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung yang memiliki IKF 0,4024 ataupun dari Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal terbesar di antara seluruh daerah di Indonesia. IKF DKI Jakarta berada pada level 0,7107.

Selain IKF, BPK juga melaksanakan kajian atas kesinambungan fiskal jangka panjang pemerintah dan pelaksanaan transparansi fiskal. Dari hasil *review*, BPK menilai, pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang dengan mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor.

Namun, Agung menekankan, langkah ini masih perlu didukung peraturan untuk menjamin keberlanjutan dan konsistensinya. Agung menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan risiko fiskal dalam jangka panjang. Khususnya yang disebabkan tidak tercapainya rasio utang terhadap PDB, rasio defisit terhadap PDB, dan keseimbangan primer positif sebagaimana ditetapkan RPJMN 2014-2019.

Beberapa indikator kerentanan utang juga patut diperhatikan. Di antaranya mengenai rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan, dan rasio utang terhadap penerimaan.

BPK juga mengidentifikasi sejumlah masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019. Meski BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), perlu ada sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Salah satu permasalahan yang disoroti BPK adalah kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur.

BPK juga memberikan catatan khusus terhadap Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan. Agung mengatakan, penyaluran dana peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS) 2016 hingga 2019 pada BPDPKS belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan. Sebab, identitas pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya valid dan terdapat dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu turut mendapatkan sorotan. Salah satunya, terdapat surat tagihan pajak atas kekurangan setor yang belum diterbitkan oleh Ditjen Pajak dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi.

■ ed: ahmad fikri noor